

BAB III

LEMBAGA-LEMBAGA PENTING DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN UNI EROPA DAN POSISI PERANCIS PADA LEMBAGA- LEMBAGA TERSEBUT

Di dalam proses pembentukan kebijakan atau *decision making* di Uni Eropa, keputusan yang diambil di Uni Eropa bukanlah keputusan yang diambil oleh salah satu pihak atau perseorangan. Meskipun peran seorang pemimpin bisa mempengaruhi, namun pada akhirnya keputusan yang diambil berdasarkan persetujuan semua negara-negara anggota Uni Eropa yang diwakili oleh perwakilan-perwakilan mereka yang menduduki lembaga-lembaga penting di Uni Eropa. Berikut ini adalah lembaga-lembaga penting yang paling berperan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan di Uni Eropa.

A. Lembaga-lembaga Penting Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Uni Eropa

Di dalam setiap pembentukan kebijakan di Uni Eropa, terdapat tiga lembaga-lembaga yang berperan penting dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakannya. Tiga lembaga penting yang paling dominan dalam proses pembuatan kebijakan Uni Eropa adalah sebagai berikut:

1. Komisi Uni Eropa (*European Commission*)

Komisi Uni Eropa atau *European Commission* (biasanya hanya disebut *The Commission*) berkantor pusat di Brussels, Belgia adalah kekuatan penentu dalam

menyusun Eropa. Hanya Komisi Uni Eropa yang memiliki hak inisiatif untuk

mengajukan proposal atau rancangan undang-undang Tidak ada badan Uni Eropa lain maupun negara anggota yang berhak untuk mengajukan proposal selain Komisi. Bahkan jika proposal yang diajukan ditolak oleh Dewan Uni Eropa (dan Parlemen Eropa melalui *co-decision procedure*), maka hanya Komisi pula yang berhak merubahnya (kecuali ditolak secara *unanimity*). Dalam menyusun sebuah proposal kebijakan, Komisi Uni Eropa berkonsultasi terlebih dulu kepada para ahli di bidang kebijakan tersebut maupun publik. Pada kebijakan-kebijakan tertentu Komisi Uni Eropa bisa berkonsultasi pada Dewan Uni Eropa maupun Parlemen Uni Eropa.⁵³

Komisi juga mempunyai peran sebagai *the guardian of the Treaties and of the "acquis communautaire"* (seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa). Dalam kaitan ini, salah satu tugas utama Komisi adalah memastikan negara anggota mematuhi semua hukum Uni Eropa dan karena itu Komisi memiliki kewenangan investigasi. Komisi juga merupakan badan eksekutif dan karena itu memiliki peran administratif untuk memastikan tercapainya semua tujuan yang telah dirumuskan dalam berbagai traktat Uni Eropa. Komisi juga memainkan peran representasi, yang mewakili Uni Eropa di berbagai organisasi internasional maupun dalam berhubungan dengan berbagai negara.⁵⁴

Komisi Eropa saat ini terdiri dari 20 orang Komisioner (dua orang untuk lima negara besar yaitu Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, dan Jerman, sedangkan sepuluh negara lainnya hanya diwakili oleh satu orang Komisioner) dan dipimpin

⁵³ Europa.eu, "European Commission", diakses dari <http://europa.eu/about-eu/institutions->

oleh seorang Presiden. Presiden Komisi Uni Eropa tahun 2008 dan masih menjabat hingga sekarang adalah Jose Manuel Barroso.

Sesuai Traktat Maastricht 1992, masa jabatan para Komisioner adalah lima tahun kecuali ada upaya untuk mengubahnya (censure motion) dari Parlemen Eropa. Melalui proses konsultasi dengan Parlemen Eropa, pemerintah masing-masing negara anggota dengan suara bulat mengajukan calon Presiden Komisi Eropa beserta calon-calon Komisioner yang akan ditunjuk. Presiden Komisi diangkat dengan kesepakatan bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.⁵⁵

Berdasarkan Artikel 55 Traktat Roma 1957, Komisi Eropa mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan seluruh ketentuan dan keputusan lembaga-lembaga Uni Eropa secara tepat.
- b. Membuat usulan kebijakan kepada Dewan Menteri mengenai berbagai kebijakan Uni Eropa di bidang pertanian, industri dan pasar internal, riset, energi, lingkungan, masalah sosial dan regional, serta perdagangan eksternal.
- c. Menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada keputusan Dewan atau penerapan langsung traktat.

Komisi Uni Eropa juga mempunyai beberapa kewenangan-kewenangan selain dari kewenangan yang tersebut diatas. Kewenangan Komisi tersebut antara lain:

- a. Melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi, baik kepada perorangan ataupun perusahaan yang menyalahi ketentuan kompetisi Uni Eropa

b. Komisi Uni Eropa juga mengelola dana struktural dan langkah-langkah bagi kemajuan riset, pertukaran pemuda, perbaikan lingkungan, transportasi dan sebagainya.

c. Komisi juga terlibat dalam pengelolaan bidang ekonomi dan pengawasan anggaran serta kebijakan luar negeri. Dana untuk program-program Uni Eropa dikelola oleh Komisi Eropa, dan sumbernya berasal dari setoran iuran para anggota yang besarnya ditentukan oleh pendapatan per kapita masing-masing negara dan dari pajak bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang dari negara ketiga (*import duties*).

2. Dewan Uni Eropa (*Council of Minister*)

Dewan Uni Eropa merupakan badan legislatif dan pembuat keputusan di Uni Eropa yang keanggotaannya terdiri dari menteri-menteri dari pemerintahan negara-negara anggotanya. Dewan ini memiliki seorang Presiden dan seorang Sekretaris-Jendral, serta merupakan badan yang memiliki otoritas paling utama dalam pengambilan keputusan di Uni Eropa dikarenakan pembahasan isu-isu kontemporer dilakukan oleh anggota dewan yang kompatibel.⁵⁶

Presiden Dewan adalah seorang Menteri atau Kepala Negara dari negara yang sedang memegang jabatan Kepresidenan Dewan Eropa (European Summit/European Council), sedangkan Sekretaris-Jendral adalah kepala dari Sekretariat Dewan yang dipilih oleh negara anggota. Sekretaris-Jendral juga melayani sebagai *High Representative for the Common Foreign and Security*

⁵⁶ Europa.eu, "Council of The European Union", diakses dari <http://europa.eu/about-eu/institutions->

Policy (CFSP). Sekretaris Jendral Dewan Eropa tahun 2008 adalah Javier Solana. Dewan ini dibantu oleh Komite Perwakilan Tetap (COREPER).

Komite Perwakilan Tetap (COREPER) berasal dari bahasa Perancis yaitu *Comité des représentants permanents*. COREPER ini berisi perwakilan dari kepala-kepala negara atau kepala-kepala deputi anggota Uni Eropa yang bermarkas di Brussels. Tugas COREPER adalah menyiapkan agenda kementerian dan pertemuan-pertemuan penting Dewan Uni Eropa. COREPER mengawasi dan mengkoordinasi 250 komite dan para ahli dari negara-negara anggota Uni Eropa yang berkompeten terhadap isu atau permasalahan yang sedang di hadapi oleh Uni Eropa. COREPER ini membantu mempersiapkan Dewan Uni Eropa dalam menghadapi isu-isu yang sedang di bicarakan.⁵⁷ COREPER ini diketuai oleh Presiden yang sedang menjabat Dewan Uni Eropa. Di dalam COREPER terdapat dua komite, yaitu:

- a. COREPER I, terdiri dari komite dan para ahli yang sebagian besar mengurus isu-isu atau permasalahan sosial dan ekonomi.
- b. COREPER II, terdiri dari duta-duta besar luarbiasa dan berkuasa penuh (*Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary*) yang sebagian mengurus isu-isu permasalahan politik, keuangan dan kebijakan luar negeri.

Menurut artikel 240 dari *Treaty On The Fuctioning of The European Union*, dasar hukum COREPER adalah sebagai berikut, COREPER I terdiri dari badan-

⁵⁷ Europa, "Coreper", diakses dari http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/coreper_en.htm pada tanggal 3 Mei 2012 pukul

badan khusus yang membantu mempersiapkan kinerja dari para menteri yang berkedudukan di Dewan Uni Eropa, yaitu⁵⁸:

a. *Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program kerja yang berhubungan dengan isu-isu seperti ketenagakerjaan, kebijakan sosial, isu kesehatan konsumen.

b. *Competitiveness (internal market, industry, research and tourism)*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan seperti daya saing(perdagangan internal, industri, penelitian dan pariwisata).

c. *Transport, Telecommunications and Energy*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan seperti transportasi, telekomunikasi dan energi.

d. *Agricultural and Fisheries*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan pertanian dan perikanan.

e. *Environment*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan lingkungan

f. *Education, Youth and Generation (Including Audiovisual)*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan pendidikan dan generasi muda. Sedangkan badan-badan khusus yang membantu kinerja COREPER II adalah sebagai berikut⁵⁹:

a. *General Affairs and External Relations*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan isu umum dan hubungan internasional.

b. *Economic and Financial Affairs*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan ekonomi dan keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengaturan budget atau anggaran.

c. *Justice and Home Affairs*

Terdiri dari menteri-menteri yang menangani program-program yang berhubungan dengan isu-isu permasalahan keadilan dan isu-isu dalam negara, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap warga negara dan isu imigrasi.

Pada masa kepemimpinan Presiden Nicolas Sarkozy di Uni Eropa, *Justice and Home Affairs* di ketuai oleh menteri Imigrasi Perancis, Brice Hortefeux.

Dalam setiap pertemuan dewan, menteri yang hadir bukanlah menteri yang itu-itu saja. Melainkan menteri yang sesuai dengan isu yang dibicarakan. Semisal,

isu yang akan dipecahkan adalah isu pangan. Maka yang hadir adalah menteri pangan masing-masing negara anggota dan Presiden Dewan beserta Sekretaris Jenderal. Sehingga, akan terjadi kompatibilitas yang maksimal dalam menangani masalah yang sedang dihadapi oleh Uni Eropa khususnya.

Dewan Uni Eropa juga mempunyai peran khusus dalam mekanisme pembuatan kebijakan di Uni Eropa. Selain sebagai legislator, Dewan Uni Eropa juga mempunyai kesempatan untuk menjadi salah satu inisiator proposal yang akan di keluarkan oleh Komisi Uni Eropa.⁶⁰

Dalam menjalani jabatan kepresidenan nya, seorang Presiden Dewan Uni Eropa mempunyai keuntungan-keuntungan khusus, diantaranya seorang Presiden dapat mempunyai kesempatan untuk menunjukkan ketrampilan mereka dalam bernegosiasi sehingga mendapatkan pengaruh dan prestise, mendapatkan akses istimewa terhadap *current information* dan memungkinkan untuk memfokuskan anggota-anggota Dewan Uni Eropa untuk mendiskusikan tentang isu-isu atau kepentingan-kepentingan negara nya.⁶¹

Keputusan di dalam Dewan Uni Eropa tersebut diambil berdasarkan suara jumlah suara. Semakin besar jumlah warga negara tersebut, maka semakin besar negara tersebut mendapatkan jumlah suara yang lebih banyak dibandingkan kan dengan jumlah negara yang kurang padat penduduknya. Hal ini dikenal dengan sebutan "*Weighting*". Selain jumlah bobot suara, pengambilan keputusan di dalam Dewan Uni Eropa juga menggunakan system *Qualified Majority Voting*, yaitu system yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengambilan

⁶⁰ Neil Nugent, "The Governemnt and Politics of The European Union-Fourth Edition", Duke University Press Durham, North Carolina, 1999, hlm.145

⁶¹ Ibid

suara yang memiliki syarat-syarat yang sudah ditetapkan melalui Perjanjian Lisbon, sebagai berikut⁶²:

- a. Sebuah tindakan atau usulan proposal kebijakan harus memiliki dukungan minimal 55% dari negara anggota Uni Eropa (Negara-negara Anggota yaitu 15 dari keseluruhan anggota negara Uni Eropa yang berjumlah 27 negara) jika bertindak atas usulan Komisi Uni Eropa atau 72% apabila bertindak atas usulan yang lain.
- b. Sebuah tindakan atau usulan proposal kebijakan juga harus memiliki dukungan setidaknya 65% dari populasi dari Uni Eropa.
- c. Apabila ingin memblokir usulan proposal kebijakan, maka di perlukan setidaknya 4 negara untuk memblokirnya.

Berikut adalah tabel negara-negara anggota Dewan Uni Eropa dengan jumlah suara yang dimilikinya:

⁶² Eurofound, "Qualified Majority Voting", diakses dari

Tabel 3.1 Tabel Negara Anggota Dewan Uni Eropa dan Jumlah Suaranya

NEGARA	SUARA
Jerman, Perancis, Italia dan Inggris	29
Spainol dan Polandia	27
Rumania	14
Belanda	13
Belgia, Republik Ceko, Yunani, Hungaria, dan Portugal	12
Austria, Bulgaria, Swedia	10
Denmark, Irlandia, Lithuania, Slovakia, dan Finlandia	7
Siprus, Estonia, Latvia, Luxemburg, dan Slovenia	4
Malta	3
JUMLAH	345

Sumber: Eurofound⁶³

Pada isu atau permasalahan tertentu, seperti *Foreign Affairs*, terkadang Dewan Uni Eropa melalui lembaga *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) yaitu salah satu pilar dari 3 pilar penting Uni Eropa yang mengurus permasalahan yang menyangkut permasalahan luar negeri dan keamanan Uni Eropa, menetapkan sebuah *common position* melalui *Qualified Majority Voting* (QMV). *Common position* adalah sebuah tindakan yang ditetapkan oleh Dewan Uni Eropa untuk mendukung suatu kebijakan dan apabila tindakan tersebut sudah ditetapkan maka

⁶³ Eurofound, "Qualified Majority Voting", diakses dari <http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/qualifiedmajorityvoting.htm>, pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 20.50

kebijakan harus dipatuhi dan dipertahankan oleh seluruh negara anggota Uni Eropa.⁶⁴

3. Parlemen Uni Eropa

Badan yang berbentuk parlementer di Uni Eropa ini dipilih oleh warga sipil masing-masing negara setiap 5 tahun sekali. Badan ini melakukan fungsi pengontrolan terhadap Komisi Eropa namun tidak bisa merumuskan undang-undang baru. Parlemen Eropa hanya bisa mengamandemen atau memveto undang-undang yang diajukan.

Dalam beberapa kebijakan, parlemen hanya dijadikan sebagai konsultan karena dinilai ada beberapa kebijakan yang memang tidak menjadi wewenang parlemen. Anggaran Uni Eropa juga dikontrol oleh badan ini. Dengan kata lain, parlemen bertindak sebagai *democratic supervisor* karena memang dipilih langsung oleh warga sipil Uni Eropa dengan kebijakan pemilihan oleh masing-masing negara anggota yang jumlahnya ditentukan minimal 5 orang perwakilan setiap negara dan satu negara tidak bisa memiliki lebih dari 99 kursi dalam parlemen. Sehingga, segala kebijakan yang diambil oleh parlemen murni untuk rakyat Uni Eropa sebagai penentu hukum dan kebijakan tertinggi yang menjunjung demokrasi.⁶⁵

Parlemen Eropa mewakili sekitar 496 juta warga Uni Eropa. Anggota-anggotanya dikenal sebagai anggota Parlemen Eropa. Sejak 1 Januari 2007, Parlemen ini mempunyai 785 anggota. (Setelah pemilihan umum pada 2009 disepakati bahwa jumlah maksimum anggotanya akan ditetapkan 750 orang,

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Europa, "European Parliament", diakses dari <http://europa.eu/about-eu/institutions->

dengan jumlah ambang minimum 5 orang untuk setiap negara anggota. Selain itu, setiap negara anggota tidak akan mempunyai lebih dari 99 kursi.)⁶⁶ Berikut ini adalah tabel jumlah perwakilan negara-negara pada Parlemen Uni Eropa:

Tabel 3.2 Tabel Jumlah Perwakilan Negara-negara Pada Parlemen Uni

Eropa

Nama Negara	Jumlah Perwakilan
Jerman	99
Inggris, Italia, Perancis	78
Polandia, Spanyol	54
Romania	35
Belanda	27
Belgia, Republik Ceko, Yunani, Hungaria, Portugis	24
Swedia	19
Austria, Bulgaria	18
Denmark, Finlandia, Slovakia	14
Irlandia, Lithuania	13
Latvia	9
Slovenia, Siprus, Estonia	7
Luksemburg	6
Malta	5

Sumber: Europa: European Parliament⁶⁷

Komisi Uni Eropa (*European Commission*), Dewan Uni Eropa (*Council of Ministers*) dan Parlemen Uni Eropa (*European Parliament*) adalah tiga lembaga yang paling dominan dalam proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa. Ketiga lembaga tersebut sering disebut dengan Segitiga Institusional. Segitiga institusional di atas lah mesin produksi Uni Eropa dalam menyusun sebuah kebijakan yang akan di terapkan pada seluruh anggota Uni Eropa. Komisi Uni Eropa bertugas untuk mengeluarkan satu-satu nya proposal kebijakan yang sah. Kemudian negara-negara anggota Uni Eropa tersebut harus mengikuti peraturan dan prosedur serta apa saja yang telah di tetapkan pada kebijakan yang telah di setuju oleh presiden negara-negara anggota Uni Eropa dan menteri-menteri mereka yang duduk di *Council of Minister*, serta wakil-wakil mereka yang duduk dalam *European Parliament*.

Selain tiga segitiga institusional tersebut, terdapat lembaga lain yang turut berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa. Lembaga tersebut adalah Dewan Eropa (*European Council/European Summit*)

Dewan Eropa atau *European Council*, atau yang lebih dikenal dengan *European Summit* adalah lembaga tertinggi di Uni Eropa. Dewan Eropa terdiri dari Presiden Dewan Eropa atau Presiden yang sedang menduduki rotasi kepemimpinan di Uni Eropa, Presiden Komisi Eropa dan satu wakil per negara anggota; baik kepala negara atau kepala pemerintahan. Dewan Eropa dipersempit oleh beberapa pihak sebagai "otoritas politik tertinggi" Uni Eropa

Dewan Eropa aktif terlibat dalam negosiasi perubahan perjanjian dan mendefinisikan agenda dan strategi kebijakan Uni Eropa.⁶⁸

Dewan Eropa bersidang setidaknya 4 kali dalam setahun. Dalam persidangan tersebut Dewan Eropa membahas isu-isu apa sajakah yang sedang menjadi urgensi di negara-negara Uni Eropa, kemudian menentukan isu-isu tersebut menjadi fokus Uni Eropa yang kemudian akan dibuat sebuah kebijakan untuk menanggulangi isu-isu tersebut.

B. Posisi Perancis Pada Lembaga-Lembaga Penting Tersebut

“Governments are naturally in the strongest position to control or influence EU process”⁶⁹, negara-negara adalah posisi terkuat untuk mengontrol atau mempengaruhi mekanisme atau proses kinerja Uni Eropa secara natural. Peran sebuah negara juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan di Uni Eropa.

Di dalam Uni Eropa, Perancis adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Hal ini membawa keuntungan bagi Perancis dalam hal kedudukannya di organisasi regional sebesar Uni Eropa. Selain itu, Perancis juga merupakan negara yang sejak awal juga menjadi salah satu negara yang ikut memprakarsai berdirinya Uni Eropa bersama Belanda, Belgia, Italia, Luxemburg dan Jerman pada perjanjian *Treaty of Paris* tahun 1952, dimana proses integrasi negara-negara Eropa dimulai dengan dibentuknya komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (*European Coal and Steel Community*). Selain dari latar belakang Perancis di Uni Eropa yang cukup kuat, rotasi kepemimpinan yang di berlakukan di Uni

⁶⁸ Europa, “European Council”, diakses dari http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_en.htm, pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 20.00

⁶⁹ Neil Nugent, “The Government and Politics of the European Union: Fourth Edition”, Duke University Press, Durham, North Carolina, 1999, hal. 473.

Eropa setiap 6 bulan sekali, memberi kesempatan Perancis untuk berperan aktif dalam posisi-posisi penting yang didudukinya. Posisi-posisi penting Perancis di Uni Eropa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memimpin Dewan Eropa (European Council)

Dewan Eropa atau *European Council* adalah lembaga tertinggi di Uni Eropa. Sebagai anggota-anggotanya adalah kepala negara atau kepala pemerintah negara-negara anggota Uni Eropa ditambah Presiden Komisi Uni Eropa. Dewan Eropa adalah otoritas tertinggi di Uni Eropa. Dewan Eropa mengadakan sidang setidaknya empat kali setahun. Dalam sidang yang dikenal dengan European Summit tersebut, Dewan Eropa memberikan gambaran dan pengarahannya kepada Uni Eropa tentang permasalahan-permasalahan atau isu-isu apa saja yang akan menjadi fokus Uni Eropa pada satu periode kepemimpinan. Dalam Uni Eropa kepemimpinannya menggunakan sistem rotasi yang berganti setiap enam bulan sekali. Sehingga semua negara-negara anggota Uni Eropa mempunyai kesempatan untuk menduduki kursi kepemimpinan Uni Eropa. Pada tanggal 1 Juli 2008, Perancis berkesempatan untuk menduduki posisi tersebut. Presiden Nicolas Sarkozy resmi menduduki jabatan Presiden Dewan Eropa atau yang lebih dikenal dengan Presiden Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa adalah Presiden dari organisasi atau lembaga tertinggi di Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa adalah presiden atau kepala negara anggota Uni Eropa yang memimpin Uni Eropa

melalui rotasi kepemimpinan di negara-negara Uni Eropa yang berganti setiap 6 bulan sekali.⁷⁰

Di bawah Perjanjian Lisbon, sistem rotasi ini kemudian diganti menjadi sebuah posisi permanen. Setelah ratifikasi perjanjian oleh Republik Ceko pada tanggal 3 November 2009, yang terakhir dari 27 negara anggota yang melakukannya, Perdana Menteri Herman van Rompuy dari Belgia ditunjuk menjadi Presiden Dewan Eropa pertama yang permanen pada tanggal 19 November 2009. Presiden-terpilih ini mengambil sumpah jabatan pada 1 Desember 2009, pada saat Perjanjian mulai berlaku dan jabatan itu resmi berdiri. Tugas-tugas dari Presiden Dewan Eropa adalah sebagai berikut⁷¹:

- a. Mengetuai dan memajukan kerja Dewan Eropa
- b. Memfasilitasi hubungan dan konsensus tanpa adanya bias nasional
- c. Sebagai representasi kebijakan umum luar negeri Uni Eropa di panggung dunia.
- d. Memimpin seluruh rapat atau sidang Dewan Eropa/European Summit
- e. Membuat laporan kepada Parlemen Uni Eropa

Memang posisi Presiden Dewan Eropa tidak memiliki kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk merancang atau membuat undang-undang. Tetapi Presiden Dewan Eropa mempunyai kesempatan untuk memfokuskan negara-negara anggota Uni Eropa pada isu-isu tertentu, seperti kepentingannya dan negaranya. Dalam hal inilah Perancis memiliki keuntungan-keuntungan pada posisinya

⁷⁰ Europa, "European Council", diakses dari <http://europa.eu/about-eu/institutions->

sebagai pemegang kepemimpinan Uni Eropa periode tersebut. Perancis mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan posisi nya tersebut dalam rangka memasukkan kepentingan-kepentingan negara nya di Uni Eropa. Melalui peran Presiden Nicolas Sarkozy sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, yang tugas nya dalam memimpin seluruh rapat atau sidang Dewan Eropa yaitu *European Summit*, dapat membantu Perancis dalam upaya memfokuskan kepentingan nya terkait dengan kebutuhan Uni Eropa akan sebuah undang-undang imigrasi yang restriktif.

Sebagai Presiden Dewan Eropa, Nicolas Sarkozy dapat memfokuskan Dewan Eropa untuk membahas isu tertentu yang beliau inginkan. Hal ini dikarenakan dalam Dewan Eropa ini isu-isu ataupun permasalahan yang sedang hangat di Uni Eropa akan di bahas, kemudian akan di tentukan isu mana yang akan menjadi fokus Uni Eropa selama dalam pemerintahan Presiden Dewan Eropa tersebut. Kemudian nanti nya isu-isu tersebut di komunikasikan kepada Komisi Uni Eropa agar Komisi Uni Eropa mengeluarkan proposal kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dengan persetujuan Dewan Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa, barulah proposal kebijakan dari Komisi Uni Eropa tersebut bisa disahkan sebagai undang-undang.

2. Memimpin Dewan Uni Eropa (*Council Of Ministers*)

Dalam kepemimpinan nya di Uni Eropa, selain pada Dewan Eropa, Perancis juga mempunyai peranan penting pada Dewan Uni Eropa. Sebagai Presiden Dewan Eropa, Presiden Nicolas Sarkozy juga menjabat sebagai Presiden Dewan Uni Eropa. Dewan Uni Eropa adalah lembaga legislatif Uni Eropa yang bekerja bersama Parlemen Uni Eropa untuk mengesahkan sebuah kebijakan.

Kepemimpinan Presiden Nicolas Sarkozy di Uni Eropa bekerja sama dengan Presiden Komisi Uni Eropa Jose Manuel Barroso dan Presiden Parlemen Hans-Gert Pottering. Karena dalam proses pembuatan kebijakan di Uni Eropa melibatkan tiga lembaga penting tersebut yaitu Komisi Uni Eropa, Dewan Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa.

Keanggotaan Dewan Uni Eropa terdiri dari menteri-menteri dari pemerintahan negara-negara anggotanya. Ketika Dewan Uni Eropa bersidang dalam upaya memutuskan suatu kebijakan, maka menteri-menteri yang hadir di persidangan tersebut adalah menteri-menteri yang kompatibel dengan isu yang sedang menjadi topik pembicaraan sidang. Misalnya, ketika membahas tentang kebijakan imigrasi, maka yang hadir bersidang adalah menteri-menteri imigrasi dari seluruh negara-negara anggota Uni Eropa.

Kinerja menteri-menteri tersebut dibantu oleh Komite Perwakilan Tetap atau *Comité des représentants permanents* (COREPER). COREPER dibagi menjadi dua komite, yang pertama COREPER I yang terdiri dari komite dan para ahli yang sebagian besar mengurus isu-isu atau permasalahan sosial dan ekonomi. Dan COREPER II, terdiri dari duta-duta besar luarbiasa dan berkuasa penuh (*Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary*) yang sebagian mengurus isu-isu permasalahan politik, keuangan dan kebijakan luar negeri. COREPER tersebut juga diketuai oleh Presiden Nicolas Sarkozy. Dengan posisi ini, Presiden Nicolas Sarkozy berkesempatan untuk memasukkan informasi-informasi penting dan lebih mendetail berkaitan dengan isu imigrasi dalam upaya pembentukan kebijakan

Dalam kepemimpinannya pada Dewan Uni Eropa, sebuah negara berpotensi untuk mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di Dewan Uni Eropa. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor:⁷²

- a. Seberapa besar jumlah perwakilan sebuah negara tersebut pada Dewan Uni Eropa.
- b. Seberapa penting sebuah isu yang sedang di bahas bagi sebuah negara.
- c. Keinginan sebuah negara tersebut untuk memainkan peranan aktif dalam Dewan Uni Eropa.
- d. Kapasitas sebuah negara untuk memainkan peranan aktif dalam Dewan Uni Eropa.
- e. Hubungan sebuah negara tersebut dengan negara-negara lain.
- f. Prosedur pengambilan keputusan pada Dewan Uni Eropa.
- g. Kemampuan sebuah negara dalam melakukan negosiasi.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, Perancis mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di Dewan Uni Eropa, karena Perancis memenuhi beberapa faktor yang disebutkan diatas, yaitu:

- a. Perancis adalah salah satu negara yang memiliki jumlah perwakilan terbesar di Uni Eropa
- b. Isu imigrasi merupakan isu yang sangat penting bagi Perancis, karena saat ini Perancis sedang di hadapkan pada permasalahan imigrasi
- c. Perancis sangat ingin berperan aktif di Uni Eropa, apalagi Perancis sedang menjalani posisinya sebagai pemimpin Uni Eropa.

d. Perancis memiliki kapasitas untuk berperan aktif, karena posisi nya sebagai pemimpin Uni Eropa.

Dalam menjalani jabatan nya sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, Nicolas Sarkozy dibantu oleh badan yang bekerja di bawah kontrol COREPER II yakni *Justice and Home Affairs* yang di pimpin oleh Menteri Imigrasi Perancis, Brice Hortefeux. Tugas badan ini adalah membantu para menteri yang akan bersidang membahas tentang isu permasalahan imigrasi dengan mengumpulkan memberikan segala informasi dan materi yang berkaitan dengan isu yang sedang di bahas dalam agenda sidang Dewan Uni Eropa. Sekali lagi, Perancis diuntungkan dengan peranan menteri imigrasi Perancis Brice Hortefeux dalam posisi nya sebagai ketua *Justice and Home Affairs*.

Selain itu Perancis mempunyai keuntungan-keuntungan khusus, diantara nya Nicolas Sarkozy dapat mempunyai kesempatan untuk menunjukkan ketrampilannya dalam bernegosiasi sehingga mendapatkan pengaruh dan prestise, mendapatkan akses istimewa terhadap *current information* dan memungkinkan untuk memfokuskan anggota-anggota Dewan untuk mendiskusikan tentang isu-isu atau kepentingan-kepentingan negara nya.

Dalam proses pengambilan keputusan di dalam Dewan Uni Eropa tersebut diambil berdasarkan suara jumlah suara. Semakin besar jumlah warga negara tersebut, maka semakin besar negara tersebut mendapatkan jumlah suara yang lebih banyak dibandingkan kan dengan jumlah negara yang kurang padat penduduknya. Perancis adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar diantara negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Oleh karena itu Perancis memiliki jumlah suara terbesar yang ada di Dewan Uni Eropa yaitu 29 suara. Jumlah suara yang besar yang dimiliki oleh Perancis juga merupakan faktor penting yang mendukung dalam penentuan pengambilan keputusan Dewan Uni Eropa. Karena pada proses pembuatan kebijakan imigrasi tersebut, Dewan Uni Eropa akan melakukan pengambilan suara untuk memutuskan apakah proposal kebijakan imigrasi Uni Eropa yang menjadi fokus pemerintahan Nicolas Sarkozy di Uni Eropa dapat disahkan menjadi undang-